IMPLIKASI SISTEM INDUSTRIAL RANTAI PASOKAN TERHADAP EKONOMI-POLITIK PERBURUHAN DI INDONESIA

The Implications of Supply Chain Industrial System toward Political-Economic of Labour in Indonesia

SKRIPSI

Disusun Oleh

Irvan Tengku Harja

20100510178

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

IMPLIKASI SISTEM INDUSTRIAL RANTAI PASOKAN TERHADAP EKONOMIO-POLITIK PERBURUHAN DI INDONESIA

The Implications of Supply Chain Industrial System toward Political-Economy of Labour in Indonesia

Disusun Oleh:

IRVAN TENGKU HARJA

NIM: 20100510178

Telah dipertahankan dalam ujian pendadaran, dinyatakan LULUS dan disahkan di depan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada:

Hari/tanggal	: Rabu,27 Agustus 2014
Pukul	: 09.30 WIB
Ruang	: HI B FISIPOL UMY

Tim Penguji

Drs. Dimadi M. Anwar, M. Si
Ketua Penguji

Siti Muslikhati, S. IP., M. Si
Penguji I

Adde Marup W., S. IP., M. A
Penguji II

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar – benar merupakan hasil karya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memeroleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya dan atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila di kemudian hari terbukti duplikasi dan ada pihak lain yang merasa dirugikan dan menuntut, maka saya akan bertanggungjawab serta menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

Bantul, 1 September 2014

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
386C1ACF308790032
6000 DJP

Irvan Tengku Harja

"Dan mengapa kamu tidak mau berperang di di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yangt berdo'a, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu"."

(Q.S. al-Nisa' (4) ayat 75)

o

"Janganlah mencari ilmu dengan bermaksud untuk menyaingi Ulama atau untuk pameran (show) di hadapan orang-orang yang bodoh atau untuk mencari perhatian orang banyak kepadamu. Maka barang siapa melakukan hal yang demikian ini, maka nerakalah tempatnya."

(H.R. Ibnu Majah dari Jabir. Shahih)

o

"S. Umar bin al Chaththab berkata, "Yang sangat saya khawatirkan pada diri ummat Islam nanti ialah: Orang-orang munafik yang berilmu". Ditanyakan kepada beliau, "Bagaimanakah hal ini dapat terjadi (orang munafik itu berilmu)" Beliau menjawab, "Ia pandai berbicara, tetapi jiwa dan amalnya kosong"."

(Imam Al-Ghazali)

o

"Selama kaum terpelajar kita melihat bahwa perjuangan kemerdekaan sebagai masalah akademi saja, selama itulah perbuatan-perbuatan yang diharapkan itu kosong belaka. Biarlah mereka melangkah keluar dari kamar belajar menceburkan diri ke dalam politik revolusioner yang aktif."

(Tan Malaka)

o

"Tugas Pergerakan adalah menyusun penjelasan sistematis tentang revolusi sebagai tindakan melangsungkan pembebasan untuk kelas tertindas oleh kelas tertindas dan dalam konteks ketertindasan masing-masing."

(Manifesto Politik Front Perjuangan Pemuda Indonesia)

o

Tulisan ini saya persembahkan dengan penuh kesabaran kepada jiwa-jiwa terbelenggu, yang mengaku bahwa fikiran dan tindakannya telah merdeka

UCAPAN TERIMAKASIH

Skripsi sederhana ini ditujukan untuk menempuh ujian Sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulisan skripsi ini merupakan pengalaman pertama penulis, maka mohon maaf jika masih banyak kekurangan di sana-sini, entah itu materi maupun teknik penulisan, yang tentunya jauh dari sempurna.

Selama proses pembuatan, penulis banyak menerima dorongan moril dari banyak pihak, yang itu sangat berharga tentunya. Terimakasih saya haturkan kepada keluarga, terutama Mamah dan Papah, yang telah mendidik penulis dari bayi hingga dewasa kini. Kepada Ibu Siti Muslikhati, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah mengajarkan penulis dari alur hingga metode pembuatan skripsi serta masukan-masukan bermanfaat lainnya. Kepada Bapak Drs. Djumadi M. Anwar, M.Si dan Bapak Addea Marup W, S.IP., M.A selaku dosen penguji, yang telah memberikan petunjuk kepada penulis tentang kekurangan-kekurangan pada skripsi ini, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. Kepada Tiara Pramudita SNI, selaku teman dekat penulis, saya ucapkan terimakasih atas motivasi moril yang diberikan kepada penulis.

Terakhir, penulis sampaikan terimakasih kepada Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), khususnya Pimpinan Kota Yogyakarta, sebagai organisasi pergerakan yang penulis geluti sehingga penulis memiliki ruang untuk merealisasikan pengetahuan-pengetahuan penulis yang terbatas ini. Tentunya, tanpa FPPI, bisa jadi penulis tidak memiliki ruang pengamalan ilmu dan bisa jadi penulis sekedar seorang 'intelektual

Akhir kata, segala kelemahan dan kesalahan pada skripsi ini adalah kelalaian penulis sendiri. Satu-satunya harapan penulis dari tulisan sederhana ini, semoga dapat bermanfaat, walaupun hanya sekecil biji sawi.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Semesta Alam Raya, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Atas karunia-Nya yang diberikan kepada penulis-lah tentunya penulis memiliki kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak luput pula penulis ucap shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah, khususnya Muhammad SAW sebagai pejuang revolusioner, aktor utama Pembebasan Mekah.

Isi dari skripsi ini adalah buah pemikiran penulis dalam memandang penindasan struktural pada konteks perburuhan di Indonesia. Ketertarikan awal penulis dalam mengambil tema ini bermula dari refleksi penulis atas profesi Ayah sebagai buruh borongan yang berada di ranah konstruksi mesin. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, penulis merasa perlu memelajari relasi situasi-kondisi ekonomi-politik global dengan ralitas perburuhan di Indonesia.

Atas keresahan itulah, skripsi ini mencoba menjelaskan implikasi dari sistem industrial di tingkatan global terhadap politk-hukum dan sosio-ekonomis perburuhan di Indonesia. Walaupun telah banyak para pihak yang mencoba menjelaskan sebab-sebab persoalan perburuhan di Indonesia dari berbagai *frame-work*, tampaknya penulis juga perlu memberikan sumbangsih pembacaan atas persoalan perburuhan di Indonesia dari sudut pandang Ilmu HI. Penulis juga melihat kapasitas penulis yang masih terbatas, sehingga dalam skripsi ini tentu

Sejarah peradaban manusia telah membuktikan bahwa perdagangan adalah karakteristik utama dari peradaban. Dalam hubungan antar bangsa, dari zaman para raja sampai ini zaman para borjuis, telah membuktikan siapa yang memiliki kekayaan dialah yang memiliki kekuasaan. Siapa yang menguasai ekonomi ialah "dewa politk". Tetapi, penumpukan kekayaan kelas berkuasa tidak terjadi lewat aksi perampokan berkuda atau pembajakan pesawat. Namun melalui suatu mekanisme sistematis, yakni "akumulasi kapital". Akumulasi kapital bukan sesuatu tanpa rencana, melainkan terjadi secara sistemik, yang beredar diatas panggung sistem industri.

Segala sesuatu ada pasangannya, begitu juga dengan kelas penguasa. Penumpukan kekayaan diatas panggung sistem industri ditopang oleh keringat dan otot para pekerja yang memastikan mesin uang terus hidup. Kontradiksi antar golongan itu terlihat tidak nampak, karena dibatasi oleh panggung sebagai sarana penghisapan. Panggung, dalam skripsi ini dimaksud dengan sistem industrial. Buruh-lah pihak yang menopang panggung tersebut, agar pentas drama dapat terus dikonsumsi publik dan produser (borjuis) terus mendapatkan uang. Lalu pemerintah sebagai apa, ia ditempatkan sebagai EO (*Event Organizer*). EO tentunya bekerja atas kebutuhan produser, yang juga sekaligus memobilisir para tukang.

Untuk itu, maka skripsi "Implikasi Sistem Industrial Rantai Pasokan terhadap Ekonomi-Politik Perburuhan di Indoensia" ini bertujuan untuk menganalisa suatu pentas ekonomi-politik perburuhan. Skripsi ini mencoba untuk

industrial rantai pasokan) terhadap politk-hukum dan juga sosio-ekonomis perburuhan di Indonesia.

Tentunya penulis sadar diri bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan di sana-sini dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis berharap skripsi ini akan mendapat kritikan dan saran dari para pembaca agar membuka ruang perdebatan lebih jauh dalam menjelaskan persoalan-persoalan perburuhan di Indonesia. Akhir kata, semoga makna tinta diatas kertas ini bermanfaat bagi yang membacanya dan juga yang dibacakannya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar viii

Daftar Isi xi

Daftar Gambar xiv

Daftar Tabel xv

Abstraksi xvi

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 4

B. Rumusan Masalah 11

C. Kerangka Pemikiran dan Kerangka Teori 11

1. Aparatus Negara Ideologis 12

2. Teori Siklus Ekonomi 19

D. Hipotesa 24

E. Metodologi Penelitian 24

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 25

G. Jangkauan Penelitian 26

H. Sistematika Penulisan 26

BAB II. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN SISTEM INDUSTRIAL RANTAI PASOKAN 29

A. Internasionalisasi Ekonomi dan Korporasi Multinasional 32

B. Peran Negara dalam Perdagangan Internasional 36

C. Sistem Industrial Rantai Pasokan 41

1. Sistem Rantai Pasokan 43

2. Rasionalisasi Rantai Pasokan dalam Bidang Indusri 48

BAB III. PELEMBAGAAN SISTEM INDUSTRIAL RANTAI PASOKAN DI INDONESIA 58

A. Liberalisasi Kawasan ASEAN 59

1. Liberalisasi Sektor Barang 62

2. Liberalisasi Sektor Jasa 67

3. Liberalisasi Investasi 70

4. Liberalisasi Modal 71

5. Liberalisasi Tenaga Kerja 73

6. Liberalisasi Sektor Prioritas Integrasi 75

B. Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 77

1. Fasilitasi Liberalisasi Kekayaan Bangsa 79

2. Fasilitasi Rantai Pasokan Intra dan Inter Nasional 84

BAB IV. IMPLIKASI SISTEM INDUSTRIAL RANTAI PASOKAN TERHADAP POLITIK-HUKUM PERBURUHAN 90

A. Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai *Ideological State Apparatuses* 93

1. *Outsourcing* dalam UU Ketenagakerjaan 93

2. Perbandingan UU Ketenagakerjaan dengan Keputusan Menteri Perburuhan RI No. 125/K/1993 96

3. Cacat Hukum dari Hukum yang Cacat 99

B. Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai *Repressive State Apparatuses* 105

BAB V. IMPLIKASI SISTEM INDUSTRIAL RANTAI PASOKAN TERHADAP SOSIO-EKONOMIS PERBURUHAN 112

A. Restrukturisasi Formasi Hubungan Industrial 114

B. Implikasi terhadap Relasi Sosial 120

1. Diskriminasi Hak atas Pekerjaan 121

2. Diskriminasi Hak untuk Berserikat 123

C. Implikasi terhadap Kesejahteraan 125

1. Kondisi Pengupahan 129

2. Diskriminasi Upah 131

3. Pemenuhan Kebutuhan Kehidupan 136

BAB VI. KESIMPULAN 143

DAFTAR PUSTAKA 148

LAMPIRAN I 156

LAMPIRAN II 158

DAFTAR GAMBAR

1. Model Rantai Nilai Porter 44
2. Model Rantai Pasokan Bertahap Tunggal 45
3. Model Rantai Pasokan Bertahap Jamak 46
4. Tipikal Rantai Pasok Konstruksi 49
5. Struktur Organisasi Rantai Pasok 51
6. Alur Sistem Pasokan 52
7. Gambaran E-SCM 53
8. Sistem Jaringan Rantai Pasok 55
9. Elemen Utama Penguatan Konektivitas ASEAN 87

DAFTAR TABEL

1. Jadwal Penghapusan Tarif Produk Inclusion List (IL) Negara ASEAN .. 66
2. Koordinator PIS 75
3. Komponen Konektivitas 85
4. Perbandingan Aturan soal "Outsourcing"..... 98
5. Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia, Menurut Propinsi (2011-2013) 109
6. Besarnya Upah Pokok per Status Hubungan Kerja (2010) 132
7. Prosentase Tunjangan berdasarkan Status Hubungan Kerja (2010)..... 134
8. Prosentase Potongan berdasarkan Status Hubungan Kerja (2010)..... 135
9. Perbandingan UMK dengan Rata-rata Upah Pokok, Upah Riil, dan Upah Total (2009) 137
10. Upah dan Masa Kerja (2009)..... 138
11. Upah dan Pengeluaran (2009) 139

ABSTRAKSI

Pasca 1998 hingga saat ini, telah banyak usaha-usaha berarti dalam menjelaskan secara sistematis isu-isu perburuhan yang terus berkembang. Domain daripada penjelasan itu pastinya tidak melepaskan aspek politik dan hukum perburuhan. Adapun yang menjadikan sosio-ekonomi perburuhan sebagai tema sentral dalam menjelaskan realitas perburuhan, dengan catatan tetap memerhatikan politik-hukum sebagai variabel independen dari kondisi sosial dan ekonomi perburuhan. Masalah-masalah yang ditemukan dari banyak sumber bacaan secara umum dapat digeneralisir dalam rumusan, bagaimana kedudukan golongan buruh di mata negara dalam penentuan kebijakan? Apakah buruh ditempatkan sebagai subyek atau obyek kekuasaan? Lalu, antara pengusaha dengan buruh, dari kebijakan yang dikeluarkan, siapa yang mendapat apa? Bagaimana sifat hubungan antara kekuatan ekonomi pengusaha dengan negara? Bagaimana peran negara dalam memfasilitasi suatu kepentingan dari salah satu pihak? Rumusan-rumusan masalah seperti diatas dapat dijelaskan dari berbagai perspektif tentunya. Tetapi untuk menjadi suatu kajian Hubungan Internasional, perlu ditambah satu aspek, yakni apa kaitannya dengan perdagangan internasional?

Sejak kebangkitan teori HI yang bermula dari kritik aliran positivisme maka semakin ragam pula penjelasan-penjelasan yang muncul di permukaan. Penelaahan historis dan struktural dalam usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas dengan tingkat generalisasi yang mengkrucut akan menemukan kesimpulan-kesimpulan yang berarti dibanding penjelasan perspektif tradisional

Analisa konflik kepentingan antara majikan-buruh memang tidak dapat dilepaskan dari bingkai materialisme marxian. Abad 19, 20, dan 21 pembaharuan cara baca penghisapan kelas buruh sudah sedemikian banyak, dari marxis hingga neo-marxian. Namun, bukan logika penghisapan yang menjadi fokus dalam skripsi ini, tetapi hendak melihat infrastruktur dari akumulasi kapital yang ada. Oleh karenanya, sistem industrial sebagai infrastruktur eksploitasi atau bisa dikatakan *basic-structure* perlu dikaji dalam konteks kekinian. Dalam hubungan internasional, sistem industrial yang dimaksud berarti dalam kerangka globalitas. Tatanan institusional global sebagai *supra-structure* adalah refleksi dari *basic-structure*, dalam konteks satu negara berarti institusi tersebut adalah *sub-supra structure*, dengan ciri kebijakan di ranah represif maupun ideologis. Negara sebagai *sub-supra structure* yang bersifat reflektif dari *basic-structure* dapat juga dikatakan keduanya bersifat implikatif. Kemudian reproduksi relasi eksploitasi dari negara tersebut ditujukan kepada kelas yang ditindas, yakni kelas pekerja. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa antara sistem industrial dengan politik-hukum perburuhan bersifat implikatif, dan politik-perburuhan terhadap sosio-ekonomis perburuhan juga bersifat implikatif. Kompleksitas ketiga hubungan itu yang akan dikaji dalam skripsi ini. Skripsi ini mencoba menjelaskan implikasi sitem industrial yang berlaku saat ini, yakni sistem industrial rantai pasokan, terhadap ekonomi-politik perburuhan, dengan cakupan politik-hukum perburuhan dan sosio-ekonomis perburuhan, di Indonesia.